

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan tentang Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010). Koperasi secara umum di pahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang di kelola secara demokratis.

Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan pada suatu prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Dengan demikian berdasarkan beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan usaha yang sukarela melakukan kegiatan gerakan perekonomian guna membangun kesejahteraan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.1.2 Asas Koperasi

Asas sendi dasar koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi diantaranya dimasukan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa

hasil usaha di atur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga modal dan sebagainya yang sesuai dengan oleh AIC (the international cooperative alliance) di kelompokan sebagai cooperative principles (Kholid 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas koperasi adalah suatu dasar yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Bai koperasi asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerjasama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri.

2.1.1.3 Fungsi Koperasi

Sumarso (2003) menyatakan bahwa fungsi koperasi adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk mengatinya.

Fungsi Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1967 sebagai berikut :

1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi sosial.
3. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

4. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi koperasi memiliki 4 fungsi yang berguna sebagai untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun perekonomian untuk memperbaiki suatu perekonomian.

2.1.1.4 Tujuan Koperasi

Menurut Sumarso (2003), tujuan utama pendirian Koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggota sehingga Koperasi juga memiliki andil dalam mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, dengan begitu Koperasi juga memiliki andil dalam pembangunan satu tatanan ekonomi mikro.

Dengan demikian dapat disimplkan bahwa tujuan suatu koperasi adalah membangun suatu perekonomian masyarakat yang lebih baik guna mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dengan begitu maka koperasi juga berfungsi dalam pembangunan tatanan suatu perekonomi di indonesia.

2.1.1.5 Prinsip-prinsip Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan di lakukan secara demokratis

3. Pembagian sisa hasil usaha di lakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa prinsip suatu koperasi adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka dikarenakan koperasi bersifat dari anggota untuk anggota sehingga berapapun pendapatan maka jasa yang di peroleh sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota.

2.1.1.6 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Rudiato (2010), jenis- jenis koperasi dapat di kelompokkan menjadi 4 jenis, diantaranya :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian di pinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota Koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama Koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama.

3. Koperasi Pemasaran

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membentuk para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh Koperasi.

4. Koperasi Produsen

Adalah yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi produsen.

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam

2.1.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut PSAK No 27, Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan meminjam untuk anggotanya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007:27.2).

Dengan demikian maka Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal tabungan para anggota teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

2.1.2.2 Tujuan koperasi Simpan Pinjam

Menurut Widiyanti (2003) tujuan koperasi simpan pinjam atau kredit antara lain sebagai berikut :

1. Membantu keperluan para anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2.1.3 Pemberian Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut undang – undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga.

Sedangkan pengertian pemberian kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut undang-undang perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan Pemberian bunga”. Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam anatar debitur dan kreditur dalam jangka yang telah di tetapkan dan pengembalian pinjaman disertai dengan bunga (Supramono 2009)

Maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau suatu tagihan peminjaman yang di salurkan kepada masyarakat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dimana kreditur wajib melakukan pengembalian pinjaman berdasarkan jangka waktu yang telah di tentukan pada saat awal melakukan peminjaman.

2.1.3.2 Jenis- Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2001) Terdapat beberapa macam kredit. yang dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya di gunakan suatu usaha untuk membuat pembagunan baru atau perluasan suatu usaha untuk keperluan usaha.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja di gunakan untuk keperluan meningkatkn suatu produk dalam melakukan oprasional usaha

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang di gunakan untuk melakukan suatu produksi atau investasi suatu usaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut.

b) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang hanya di gunakan untuk konsumsi pribadi atau badan usaha.

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah suatu kredit untuk perdagangan yang biasanya pembelian barang dagang yang pembayaranya di harapkan dari hasil penjualan.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang hanya berjangka pendek atau kurang dari 1 tahun biasanya kredit ini di gunakan dalam keperluan modal awal.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit berkisar antara 1-3 tahun dan biasanya kredit ini di gunakan untuk investasi.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit paling panjang yaitu berkisar antara 3-5 dan biasanya kredit ini untuk melakukan kredit jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit Dengan Jaminan

Adalah suatu kredit yang di lakukan dengan memberikan suatu jaminan biasanya jaminanya berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud.

b) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan sebuah kredit tanpa memerlukan biasanya dilihat dari prospek suatu usaha dan karakteristik dan loyalitas seorang debitur.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit Pertanian

Adalah kredit yang di biyai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat dan biasanya kredit tersebut jangka panjang dan jangka pendek

b) Kredit Peternakan

Adalah kredit yang di biyai untuk sektor peternakan rakyat dan biasanya kredit tersebut jangka panjang dan jangka pendek

c) Kredit Industri

Adalah kredit yang di gunakan untuk membiayai kredit kecil dan menengah.

2.1.3.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2001) tujuan kredit antara lain sebagai berikut

1. Mencari Keuntungan

Merupakan kredit yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pemberian kredit yaitu berupa bunga yang di peroleh oleh debitur yang melakukan peminjaman.

2. Membentuk Usaha Nasabah

Merupakan tujuan yang bermaksud memberikan bantuan kepada nasabah untuk melakukan investasi maupun pendanaan modal usaha atau kerja.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan maka banyak masyarakat yang terbantu dan meningkatkan bangunan dalam berbagai sektor.

Keuntungan yang di peroleh oleh pemerintah :

- 1) Penerimaan pajak
- 2) Membuka banyak kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- 4) Menghemat devisa Negara
- 5) Meningkatkan devisa Negara

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit suatu koperasi adalah membantu perekonomian di Indonesia dan juga mendapatkan keuntungan bagi koperasi dan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang koperasi.

2.1.3.4 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2001)terdapat 5 unsur antara lain :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian pinjaman bahwa kredit yang di berikan berupa uang, barang atau pun jasa akan diterima kembali di mana akan di tentukan masa yang telah di tentukan. Kekayaan ini di berikan oleh Bank di mana sebelumnya sudah di lakukan penelitian tentang nasabah tersebut hal ini di lakukan untuk memberikan

keamanan dan kemampuan dalam membayar sehingga tidak terjadi kredit macet.

2. Kesepakatan

Kredit dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dan debitur di mana masing-masing memiliki kewajiban dan hak.

3. Jangka Waktu

Setiap melakukan kredit maka diberikan jangka waktu dalam pengembalian baik jangka waktu pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Semakin panjang masa peminjaman maka semakin besar tingkat kemacetan atau tidak tertagih oleh sebab itu maka tingkat kemacetan tersebut akan di tanggung oleh Bank baik itu resiko yang di sengaja ataupun tidak di sengaja.

5. Balas Jasa

Adalah suatu keuntungan atau balas jasa dari kreditur kepada debitur yang berupa bunga dan biaya administrasi yang menjadi keuntungan dari Bank tersebut.

6. Jaminan Kredit

Ada beberapa jaminan yang dapat di gunakan debitur antara lain :

1) Dengan Jaminan

- a) Dengan menggunakan jaminan berwujud antara lain: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan atau pun tanah.
- b) Jaminan benda tidak berwujud antara lain sertifikat tanah, sertifikat obligasi, sertifikat saham, sertifikat deposit, rekening tabung yang di berikan, rekening giro yang di bekukan, promes wesel dan juga surat tagihan

c) Jaminan Orang

Adalah jaminan di mana ketika terjadi kredit macet maka orang tersebut yang akan menanggung kredit tersebut.

2) Tanpa Jaminan

Kredit macet adalah kredit di mana biasanya di berikan kepada perusahaan yang memiliki bonafit dan professional sehingga kemungkinan kecil kredit tersebut mengalami kemacetan.

2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Terdapat beberapa prinsip antara lain :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa watak ataupun sifat dari orang yang akan melakukan kredit dapat di percaya semua itu dapat di lihat dari latar belakang nasabah itu sendiri.

2. Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah tersebut maka dapat di lihat dari pendidikan yang di ukur dengan ketentuan pemerintah begitu pula dengan kemampuan dalam mengelola usahanya.

3. Capital

Untuk mengetahui apakah penggunaan modal sudah efektif maka dapat di ukur dengan melakukan pengukuran seperti likuidasi, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang bersifat fisik maupun non fisik di mana jaminan tersebut harus melebihi jumlah dari kredit tersebut dan teliti keabsahan sehingga tidak terjadi suatu masalah yang akan datang.

5. Conditional

Di mana dalam penilain kredit tersebut maka di lihat dari nilai ekonomi, politik dan juga masa yang akan datang

sesuai dengan sektor masing-masing serta prospek dalam usaha tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pemberian kredit terdapat 5 prinsip yakni Character, Capacity, Capital, Collateral dan yang terakhir yaitu conditional.

2.1.3.6 Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan dalam pemberian suatu kredit. Tujuannya adalah untuk mempermudah pihak yang memberikan kredit dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

1. Pemohonan Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir, 2009) :

- 1) Pengajuan berkas permohonan kredit dalam bentuk proposal.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui kelengkapan berkas pinjaman.
- 3) Penilaian kelayakan kredit (aspek hukum, Pasar dan Pemasaran, Keuangan,
- 4) Teknis/Operasi, Manajemen, Ekonomi Sosial, AMDAL)
- 5) Wawancara awal.

- 6) Peninjauan kelokasi (On The Spot)
- 7) Wawancara II.
- 8) Keputusan Kredit.
- 9) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
- 10) Realisasi Kredit.
- 11) Penyaluran/penarikan dana

2. Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit

menurut Siswanto sutojo (2003) adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perkreditan yang sehat.

3. Keputusan Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu: (Suhardjono, 2003)

- 1) Tahapan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
- 2) Tahap pemberian kredit rekomendasi kredi
- 3) Tahap pemberian putusan kredit
- 4) Tahap pencairan kredit

4. Prosedur Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit (disbursement) harus terjamin azas aman, terarah, dan produktif

5. Prosedur Pemantauan atau Pengawasan Kredit

1) Sifat Pengawasan

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual pernasabah/debitur

2) Sarana Pemantauan Kredit

Sarana pengawasan dalam perkreditan yang mempunyai tingkatan tertinggi adalah perundang-undangan yang mengatur perbankan dan kegiatan perdagangan pada umumnya dan khususnya yang mengatur perkreditan. Sarana tersebut dalam bentuk hardware dan software sebagai berikut: (Djohan, 2003).

2.1.3.7 Faktor-faktor yang menyebabkan Kredit macet

Menurut Supramono (2009) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet antara lain :

1. Faktor yang berasal dari nasabah

1) Nasabah menyalah gunakan kredit

Setiap kredit yang telah di pinjamkan maka akan di berikan perjanjian tujuanya agar kredit yang di berikan tidak mengalami penyimpangan, dengan adanya penyimpangan maka pihak kreditur sulit melakukan pengembalian.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahnya

Nasabah telah menerima fasilitas kredit namun dalam praktiknya nasabah tidak profesional dalam melakukan usahnya akibatnya pendapatan nasabah kurang maksimal oleh sebab itu maka berdampak pula pada pengembalian ke Bank yang dapat berakibatnya kredit macet.

3) Nasabah beritikad tidak baik

Ada beberapa nasabah yang sengaja memiliki itikad tidak baik setelah memperoleh pinjaman kredit nasabah tersebut tidak melakukan pengembalian atau bahkan melarikan diri oleh sebab itu maka Bank akan mengalami kerugian dengan adanya kredit macet.

2. Faktor yang berasal dari Bank

1) Kualitas Pejabat Bank

Setiap petugas bank atau karyawan wajib melakukan pekerjaanya dengan profesional sehingga terciptanya masyarakat yang memadai, meskipun demikian masih ada juga pejabat yang melakukan penyelewengan yang dapat merugikan pihak Bank tersebut.

2) Persaingan Antar Bank

Saat ini banyak jumlah bank yang sudah tersedia oleh karena itu maka persaingan antar Bank semakin banyak. Dalam melakukan persaingan usaha maka Bank meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan kemudahan dalam memfasilitasi kredit untuk masyarakat.

3) Hubungan Intern Bank

Kredit macet saat ini bias juga di sebabkan karena tidak meratanya pemberian kredit karena Bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank karena penyaluran cenderung di berikan kepada pengurus, pengawas dan karyawan Bank.

4) Pengawasan Bank

Mulai dari proses pemberian kredit sampai pemberian kredit terjadi semua memiliki perjanjian semua itu memiliki pengawasan karena pekerjaan Bank diawasi oleh Bank Intern dan pengawasan Eksteren yaitu BI dan BPKP khusus untuk bank milik Negara.

Adanya Bank yang tidak sehat maka Bank dapat terkena likuidasi tidak terlepas dari kredit macet, yang menjadi faktor utama kredit macet adalah lemahnya pengawasan dalam UU IB yang di

atur pengawasan Bank yang di serahkan ke lembaga pengawas independen.

2.1.3.8 Teknik penyelesaian kredit macet

Terdapat beberapa kredit macet antara lain :

1. Dari pihak perbankan

Dalam menganalisis suatu masalah kurang teliti sehingga yang seharusnya terjadi tidak di prediksi sebelumnya dapat pula terjadi karena kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dapat menganalisis kurang subyektif.

2. Dari pihak nasabah

Terdapat kemacetan yang terjadi ketika nasabah melakukan

1) Adanya unsur kesengajaan

Adanya kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kewajibanya kepada Bank akibatnya terjadinya kemacetan yang terjadi.

2) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya seorang nasabah ingin membayar kewajibnya akan tetapi nasabah tersebut mengalami kecelakaan, kebakaran atau bahkan banjir oleh karena itu maka terjadi kredit macet pada Bank.

2.1.4 Penerapan Manajemen Resiko

2.1.4.1 Pengertian Resiko

Menurut Fahmi (2010) penerapan manajemen resiko adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi dapat menerapkan ukuran dalam menerapkan suatu permasalahan yang di tunjuk untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian besar dari suatu transaksi instrument.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Resiko, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen resiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya suatu resiko di dalam perusahaan tersebut di mana di dalamnya terdapat kehiatan pengidentifikasi, perencanaan, strategi, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa suatu usaha atau perusahaan tersebut.

2.1.4.2 Jenis Resiko

Terdapat beberapa indikator yang terdapat dalam suatu resiko di antara lain sebagai berikut :

1. Resiko Kredit

Resiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, lembaga keuangan, entitas maupun pribadi dalam menjalankan dan menyelesaikan suatu kewajiban baik itu pada saat jatuh tempo ataupun sesudah jatuh tempo dan semua itu sudah sesuai dengan aturan kesepakatan yang berlaku.

2. Resiko Suku Bunga

Resiko suku bunga adalah suatu resiko di mana resiko yang di alami saat perubahan suku bunga di pasaran yang mampu membuat pengaruh bagi pendapatan.

3. Resiko Oprasional

Resiko oprasional adalah resiko di mana biasanya resiko tersebut bersumber dari masalah internal perusahaan di mana resiko itu terjadi karena lemahnya sistem kontrol manajemen yang di lakukan oleh pihak internal perusahaan tersebut.

4. Resiko Pasar

Resiko pasar merupakan adalah resiko dimana terjadinya karena diakibatkan karena adanya perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan.

5. Resiko Valuta Asing

Resiko valuta asing adalah resiko di mana terjadinya perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan terutama pada dasarnya dikonversikan dengan mata uang domestik.

6. Resiko Perbankan

Resiko perbankan adalah resiko suatu resiko yang di alami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari suatu keputusan di lakukan.

7. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah adalah resiko yang di alami oleh suatu perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga membuat terganggunya aktivitas dalam perusahaan tersebut.

8. Resiko Fraud

Resiko fraud adalah resiko yang di akibatkan adanya tindakan yang di lakukan secar sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok di mana tindakan tersebut dalam membuat kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.

2.1.4.3 Program-program Manajemen Resiko

1. Indentifikasi resiko-resiko yang di hadapi, identifikasi resiko mencakup pengertian macam-macam resiko yang akan di peroleh dari kegiatan Bank yang di lakukan dengan menganalisa sumber dan penyebab munculnya resiko serta dampaknya (Goyal, 2010).
2. Pengukuran resiko atau penentuan besarnya resiko tersebut, pengukuran resiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha

3. Penanggulngan resiko. Kegiatan yang di lakukan untuk mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi resiko tersenbut
4. Penyusunan strategi untuk memperkecil atau mengendalikan resiko
5. Pengkogoordinasian terhadap pelaksanaan penganggulngan resiko serta mengevaluasi program penganggulngan yang telah di buat .

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

2.1.5.1 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2011) definisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini :

1. Pengendalian intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu .
2. Akan tetapi pengendalian intern bukan merupakan tujuan tertentu, pengendalian intern adalah suatu rangkaian tindakan persifat perfasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu entitas.
3. Pengendalian internal di jalankan oleh seseorang dari setiap organisasi yang mencakup Dewan Komensaris, manajemen dan personal lain
4. Pengendalian intren di harapkan mampu memberikan keyakinan memadai, keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intren dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam mencapai tujuan tertentu

5. Pengendalian intern di harapkan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan; Pelaporan, keuangan .kepatuhan dan operasi. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses pengarahan personal satuan usaha dalam struktur organisasi untuk melaksanakan tindakan manajemen untuk mencapai dalam hal menjaga kekayaan perusahaan, keandalan dan ketelitian suatu laporan serta kesesuaian kebijakan undang-undang serta mendorong efektivitas dan efisiensi oprasi.

Pengendalian intern adalah suatu pengawasan yang di lakukan untuk mendorong ditetapkanya manajemen dan mendorong terciptanya efisinsi oprasional untuk melindungi aktiva perusahaan dari kecurangan, pemborosan, pencurian serta terciptanya data akuntansi yang tepat dan dapat terpercaya. Jusup (2003).

2.1.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2011) tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 golongan tujuan :

1. Keandalan suatu informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efesiensi oprasi.

Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut maka pengendalian intern akan menjadi relevan dengan audit atas laporan keuangan,

tanggung jawab auditor dalam memenuhi standart pekerjaan lapangan, oleh karena itu setiap audit internal harus memahami pengendalian intrn yang di tujukan untuk memberikan kewajaran keyakinan memadai bahwa laporan keuangan di sajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi bertrima umum di lapangan.

2.1.5.3 Standar Sistem Pengendalian Internal

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi yang mempengaruhi suatu kesadaran personal tentang berbagai macam faktor yang secara bersama mempengaruhi kebijakan dan prosedur yang membentuk disiplin dan struktur. Beberapa faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

- 1) Menetapkan suatu lingkungan dengan mendemonsasikan integritas dan mempraktikan standart dan prilaku etis.
- 2) Mengomunikasikan kepada seluruh karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang kode etik prilaku.
- 3) Mengurangi atau meminimalisir suatu insentif atau suatu godaan tentang hal yang melanggar hukum yang mengarahkan individu untuk tidak melakukan hal yang tidak jujur.

2. Penilaian Resiko

Setiap organisasi memiliki suatu resiko baik itu resiko bisnis maupun resiko non bisnis suatu resiko yang telah

diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat intensitas dan tindakan untuk meminimalkan atau mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum. Dengan suatu penyusunan laporan yang di sajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

3. Aktivitas Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan yang di buat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang di buat manajemen di laksanakan. Oleh karyawan yang di buat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai .

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan kedalam berbagai kategori adalah sebagai berikut :

- 1) Pemisahan tugas di mana memastikan bahwa karyawan tidak melakukan tugas yang tidak seimbang, tugas di anggap tidak seimbang ketika individu melakukan kecurangan atau kekeliruan dan kemudian menutupnya dalam tugas normalnya.
- 2) Pengendalian pemrosesan mengacu pada hubungan dengan otoritas, kelengkapan dan juga akurasi transaksi.
- 3) Pengendalian fisik menaruh perhatian pada suatu pembatasan dua jenis yaitu ativa dan catatan yang penting antara lain: akses fisik langsung dan akses fisik tidak langsung yang

semua itu melalui pemrosesan dokumen. Pengendalian internal berkenaan dengan alat penyimpanan aktiva dokumen maupun catatan, alat tersebut dapat berupa ruangan penyimpanan yang aman.

4) Evaluasi kerja meliputi evaluasi dan analisis manajemen

4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Sistem akuntansi merupakan suatu kunci dalam pengendalian ini, diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, mengolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi serta mengomunikasikan informasi kepada pihak yang tepat agar mereka dapat melakukan tanggung jawab bertanggung jawab.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan adalah proses monitoring penilaian kualitas kinerja pengendalian di lakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau peringatan yang di berikan oleh sistem akuntansi untuk mengetahui apakah pengendalian intern beroperasi sebagai mana yang di harapkan.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menambahkan teori dalam melakukan penelitian. Beberapa acuan jurnal yang menjadi acuan bagi penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

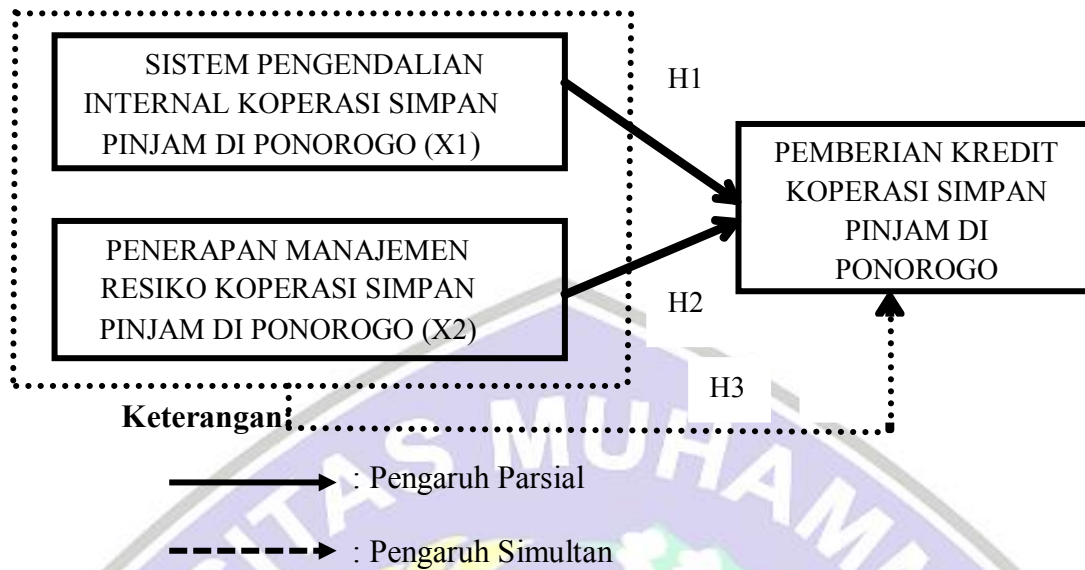
No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siregar, M. (2010).	Pengaruh pengendalian intern terhadap pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Riau cabang Bangkinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Pengendalian Intern 2. Pemberian Kredit 	Sudah sangat baik karena dalam pengendalian internal dalam pemberian kredit sudah signifikan mencakup seluruh indikatornya.
2	Dewati, A. W. (2015)	Evaluasi efektivitas pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit (studi kasus pada PD BPR Bank Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pengendalian Internl 2. Pemberian Kredit 	Sistem emberian kredit yang di lakukan oleh PD BPR Bank Klaten sudah memenuhi unsur unsur pengendalian internal Menurut COSO dan sudah efektif
3	Pratiwi, M. A. (2016)	Evaluasi pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit studi kasus di PD PBR Bank Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian internal 	Sistem pengendalian internal yang di lakukan oleh PD PBR Bank Bantul sudah berdasarkan teori dan jugasudah efektif dalam melaukan pemberian kredit.
4	Atriani, & Maryana. (2017)	Pengaruh pengendalian internal terhadap pemberian kredit (survei pada PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh pengendalian internal 2. Pemberian kredit 	Pengendalian internal sudah berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit dan memiliki

		Multifinance Tbk (Kota Lhokseumawe)		hubungan yang erat dalam pemberian kredit PT Multifinance Tbk Kota Lhokseumawe
5	Handayani, C. A. (2018)	Pengaruh penerapan manajemen resiko dan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit (studi kasus pada Bank Umum Milik Negara di Kota Malang)	1. Penerapan manajemen resiko 2. Audit internal 3. Kebijakan pemberian kredit	Penerapan manajemen resiko berpengaruh positif terhadap pemberian kredit sedangkan audit internal tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian kredit sehingga berpengaruh negatif.

Sumber : Data diolah (2019)

2.3 KERANGKA BERFIKIR

Pengendalian internal adalah salah satu alat manajemen perusahaan untuk mengarahkan oprasi, memaksimalkan pemberian kredit dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pimpinan perusahaan menyadari akan pentingnya manajemen di dalam mengatur tentang pengendalian internal sebagai suatu alat berharga dalam menyampaikan tanggung jawabnya, sehingga di gambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki 2 variabel independen yaitu sistem pengendalian internal (X1) dan penerapan manajemen resiko kredit (X2) sedangkan variabel dependen yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu pemberian kredit (Y). Penelitian ini memiliki relasi antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y serta X1 dan X2 terhadap pemberian kredit Y.

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh yang terdapat pada sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen resiko terhadap pemberian kredit sebagai variabel dependen. Peneliti menduga bahwa kedua variabel diatas berpengaruh terhadap pemberian kredit.

2.4 HIPOTESIS

Menurut Husaini (2008) "Hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara mengenai rumusan dari penelitian yang dikemukakan. Perumusan hipotesis adalah kesimpulan yang ditarik sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian".

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Pengendalian internal meliputi suatu proses yang terkoordinasi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah disusun untuk mencapai keefektivitasan dan efisiensi operasi.

Menurut Ardiyos (2010) "Sistem adalah seperangkat komponen-komponen atau unsur-unsur yang dijalin untuk memperoleh atau mencapai sesuatu atau berbagai tujuan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan dan pendapatan yang dapat mempengaruhi tersedianya layanan perbankan dengan baik". Dengan demikian sistem pengendalian internal dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur keefektivan kinerja Bank.

Dalam penelitian Sabi (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit dengan arah positif. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesis pertama sebagai berikut:

Ho₁: Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi empiris Ponorogo)

Ha₁: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi empiris di Ponorogo)

2.4.2 Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pemberian Kredit

Resiko adalah serangkaian metodologi atau seni pembuatan keputusan dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Dengan adanya manajemen resiko yang baik akan dapat mengurangi tingkat potensi kerugian pada Koperasi dan mempengaruhi pemberian kredit yang mampu meningkatkan dan berpengaruh pada perkembangan koperasi itu sendiri. Apabila manajemen resiko Koperasi berjalan dengan baik maka kredit yang diberikan akan berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya.

Dalam penelitian Handayani (2018) menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit dengan arah positif. Sehingga hipotesis yang kedua adalah:

Ho₂: Penerapan manajemen resiko tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi empiri di Ponorogo)

Ha₂: Penerapan manajemen resiko berpengaruh terhadap pemberian Simpan Pinjam (Studi kredit Koperasi empiris di Ponorogo)

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi empiris di Ponorogo)

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Dengan sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen resiko yang baik dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit begitu pula sebaliknya. Sehingga hipotesis yang ketiga adalah :

Ho₃ : Sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen resiko tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi kasus di Ponorogo)

Ha₃ : Sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen resiko berpengaruh terhadap pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi empiris di Ponorogo).